

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP

TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)



OLEH :

ANDY REZKI JULIARNO

B111 12 326

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDY REZKI JULIARNO

B111 12 326

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Rabu 25 Januari 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H
NIP. 19620105 1986011 001

Dr. Nur Azisa, S.H, M.H
NIP. 196710101992032 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ahamdi Miru, S.H, M.H
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDY REZKI JULIARNO**

No. Pokok : **B 111 12 326**

Program : **ILMU HUKUM**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Proposal : **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus
Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian
Skripsi.

Makassar, 18 November 2016

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H

NIP. 1962 0105 1986 011 001

Pembimbing II


Dr. Nur Azisa, S.H, M.H

NIP. 1967 1010 1992 032 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

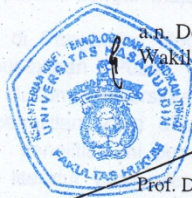
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDY REZKI JULIARNO
Nomor Pokok : B11112326
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana
Pengedaran Narkoba (Studi Kasus Putusan
No.469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

ANDY REZKI JULIARNO (B111 12 326), Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H. dan Dr. Nur Azisa, S.H, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan Narkoba, serta menguraikan fakta yang didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar untuk penelitian lapangan, serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis, selain itu penulis juga melakukan metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber hakim.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: Eksistensi Pidana Mati dalam penjatuan pidana mati ditinjau dari Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia, bagaimana pelaksanaan pidana mati di Indonesia, Pro dan Kontra Pidana Mati, serta Pidana Mati dalam perspektif HAM. Eksekusi pidana mati banyak mengundang pro dan kontra. Tapi menurut penulis Hukuman Mati tetap harus diterapkan untuk ketentuan pidana yang sudah mengancam kepentingan umat manusia. Dalam hal ini pidana Narkotika, Indonesia yang saat ini benar-benar dalam keadaan Darurat Narkotika, agar dalam teori tujuan pembedaan dapat tercapai.

ANDY REZKI JULIARNO (B111 12 326), Juridical Review Imposition of Capital Punishment Against Crime Narcotics Circulation mentored by Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H. and Dr. Nur Azisa, S.H, M.H.

This research purposed to know the existence of Capital punishment in Indonesia are reviewed in the perspective of human rights and how the legal considerations of the judge in the verdict against perpetrators of drug possession, as well as outlining the facts obtained in the field through interviews with the author of the judges.

This research was conducted in the Makassar District Court for field research, and Hasanuddin University Central Library and the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University, for literature research. Methods of research by the author is the research methods literature, the study authors do by reading and reviewing the literature that is relevant and directly related to the object of research that serve as the theoretical foundation, besides the authors also perform methods of field research, conducted by interview or direct talks and open in the form of question and answer to the informant judges.

The results obtained by the author in conducting this study is: Existence Capital punishment in terms of the Criminal Positive Law Dead in Indonesia, how the implementation of the Capital punishment in Indonesia, Pros and Cons Dead Criminal and Capital punishment in the perspective of human rights. Executions make many pros and cons. But according to the author of the Capital punishment should still be applied to the criminal provisions that already threaten the interests of mankind. In this case the criminal narcotics, Indonesia is now really in a state of Critical Narcotics, so in theory the purpose of punishment can be achieved.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI ATAS PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan Terima Kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Hj. Farida Patinting, S.H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H. selaku Pembimbing I Dan Dr. Nur Azisa, S.H, M.H. selaku Pembimbing II Skripsi yang Telah

Meluangkan Waktu untuk Memberikan Masukan, Bimbingan, dan Motivasi yang Membangun Kepada Penulis Hingga Skripsi ini Terselesaikan dengan Baik.

4. Skripsi ini saya persembahkan Kepada Kedua Orang saya Bapak Drs. Supratman, B.C.K.U, dan Ibunda Sumarni B.A.C yang Sangat Saya Cintai dan Hormati yang Tak Henti - Hentinya Memberikan Dukungan, Doa, Nasehat, dan Motivasi Hingga sampai Detik ini Penulis Tetap Kuat dan Bersemangat dalam Menyelesaikan Studi.
5. Bapak Kristian P. Djati S.H, M.H. yang Telah Meluangkan Waktunya Memberikan Bantuan Selama Proses Penellitian Di Pengadilan Negeri Makassar.
6. Kepada mereka yang mengaku Keluarga Cemara, Andi Nurul Avira Aulia S.H., Indah Dwi Astuti S.H., Nur Inayah Magfira, Kartini S.H., Miftahul Sakinah Assyafiah, Annisa Gayatri Silvika, Nurul Apriliani Anwar S.H., Nyoman Suarnigrat Tri Astika S.H., Muhammad Akmal Idrus, Vhyra Amreny Avriwanty, Utiya Dini S.H., A. Alifya Arzam.
7. Kepada Sahabat-Sahabat Seperjuangan Selama Saya Kuliah Achmad Dzulfikar S.H., Achmad Fauzi Tilameo, S.H, Muhammad Noartawira Sadirga S.H., Edo Satria Mandala S.H., Eko Setiawan S.H., Nur Ukasyah S.H., Arham Aras S.H., Maipa Deapati S.H., Ramadhan Satria S.H., Wahyudi Kasrul S.H., Yoga Alexander S.H., Muh. Nur Fadli Imran, Nur Fajrin S.H., Nisrina Atika, Lisa, Heriansyah S.H., Firman Nasrullah S.H., Febri Maulana, Fatia Kurniasari S.H., Dian Martin S.H., Arlin Joemka S.H., Aldy Hamzah,

Anggy Hardiyanti S.H., Terima Kasih Atas Waktu dan Kebersamaan yang Tidak Akan Pernah Tergantikan dan Terlupakan, Dukungan, Doa, Semangat yang Tak hentinya. Terima Kasih Untuk Semunya.

8. Untuk Angkatan yang Luar Biasa PETITUM 2012, Keluarga Besar HLSC 2012, Keep Loyal and Justice For All, Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014/2015, Kepanitia Panitia Pemilihan Umum 2016.
9. KKN Gel. 90 Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Ulu Ale, selaku Posko Induk, Andi Kartika Ramadhani S.H., Sheila Masyita Muchsen S.H., (Almh) Rezky Febriyanti, Murtafiah Daris S.K.H, Raldy S.K.H, Raynald Korcam Christian Adhiwidjaya S.T., Rudi Angi', Puspita Wulandari. Like a second family. Serta kakak-kakak empunya rumah, maaf kami sangat merepotkan.
10. Keluarga Besar Alumni @Ex_Active SMA Neg. 6 Makassar diantaranya, Ais Qhusnul, Andis Kapati, Rahmat Yudha, Rahmat Luthfi Pasandrangi S.E, Muh. Firsan Ilyas, S.Ked, Muh. Farhan S.Ked, Firman Hidayat, Ichwanul Fajrie, Indrasurya Setiabudhi, A.Md, M. Irsad Tirtasah, Fitriadi, A.Md., Tri Zulkifly Lusman.
11. Keluarga Besar Pakopi Crew BTP, Kanda Irfan Marhaban S.H., A. Hidayat Nur Putra S.H., Fadhlani Hidayat S.H., Badawi Awi, Kanda Rahmatullah S.H., Fauzan Aries S.H., M.H., Ombie, Achir serta seluruh Barista Pakopi.
12. Serta Seluruh Pihak yang Ikut Membantu, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Penulis Hanya Bisa Berdoa, Semoga Allah Membalas Kebajikan - kebaikan Mereka Dengan Setimpal. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Januari 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>)	8
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>)	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Pembagian Unsur Tindak Pidana.....	14
4. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
5. Bentuk-Bentuk Penyertaan	19
B. Narkotika.....	24
1. Definisi Narkotika.....	24
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	29
3. Tindak Pidana Narkotika.....	38

C. Pidana.....	42
1. Pengertian Pidana	42
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	44
3. Jenis-jenis Pidana Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	48
4. Pidana Mati.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis & Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Umum Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus: No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)	58
1. Narkotika.....	58
2. Pidana Mati.....	60
B. Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia	64
1. Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia	64
2. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.....	67
3. Pro dan Kontra Pidana Mati.....	69
4. Pidana Mati dalam Perspektif HAM.....	74
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku kepemilikan Narkotika Gol. I dalam putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks.....	77
1. Posisi Kasus	77
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	78
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	83

4. Amar Putusan	83
5. Pertimbangan Hukum Hakim	85
6. Analisis Penulis.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembang tindak kriminal yang dapat membawa dampak merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karena itu Indonesia yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi sebagai saksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, sehingga eksistensi Negara bisa terwujud.

Masalah yang sering ditemukan dalam masyarakat yang berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana pada kenyataan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku manusia yang semakin kompleks dan bahkan multi kompleks merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan ini bisa-bisa berpengaruh kearah positif maupun negative yang arahnya positif dinilai dengan sesuai kaidah ataupun normayang berlaku sedang arah negatifnya bertentangan dengan norma menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia yang dinilai suatu pengangguran bahkan sebagai suatu kejahatan.

Pandangan modernitas yang menghendaki adanya pembongkaran tata nilai atau norma dalam masyarakat, justru menjadi variabel pemicu lainnya, berbagai bentuk tindak pidana dalam masyarakat. Tentu saja ini menjadi relevan karena proses penetrasi budaya luar terhadap perubahan tata nilai maupun norma dalam masyarakat. Perilaku negatif ini, tentu saja lahir karena desakan kultur yang menghendaki demikian, terutama kehendak untuk melakukan tindak pidana di dalam masyarakat.

Dalam sebuah seminar tentang “Perkembangan Delik-Delik khusus dalam masyarakat yang mengalami modernisasi “bahwa modernisasi itu telah turut bertanggung jawab melahirkan banyak bentuk kriminalitas, hal tersebut dikarenakan:

1. Modern sendiri sebagai suatu proses untuk mencapai modernitas akan senantiasa membawa ketidak stabilan dalam masyarakat, oleh karena itu ia merupakan perubahan dari nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat.
2. Manusia modern yang ditandai oleh ciri berfikir bebas, akan selalu merasakan adanya ketidak pastian sehingga mempengaruhi hubungan dengan manusia lainnya, barang, tempat, lembaga, atau pranata keadaan sekelilingnya, ide-ide tertentu ,waktu tertentu.
3. Keadaan seolah-olah tidak ada norma akibat proses modernisasi, merangsang dan mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Permasalahan hukum yang paling menonjol dapat diidentifikasi pada kasus pidana yakni penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan psikotropika/ narkotika.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan dalam di dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan Narkotika pada akhir-akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan.

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental sosial, keamanan, ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda dan penerapannya dilakukan secara kumulatif. Agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu Pidana Mati, polemik ini misalnya mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Berdasarkan Undang-undang Narkotika pada Pasal 8 ayat (1) isinya menyatakan bahwa:¹

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

Dan dalam Pasal 8 ayat 2 isinya menyatakan bahwa ;²

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.³

Penjatuhan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan dimuka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada

¹Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 Pasal 8 Ayat (1)

²Ibid, Pasal 8 ayat (2)

³Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju; Bandung. Hlm, 173

kesadaran hukum dari korban-korban (*the sense of justice of the victims*) menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pembedaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dari permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI ATAS PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan Narkoba Gol. I dalam putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai salah satu karya ilmiah maka peneliti tentunya mempunyai tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan Narkoba Gol. I dalam putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat berguna untuk pengembangan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai penanganan perkara tindak pidana narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memikirkan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴ Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;

⁴ E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, Hlm. 205.

- c) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:⁶

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Pompe terhadap istilah *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutya terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah:⁷

Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap gangguan hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *normovertrading (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft an waarvan de bestraffing diennstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Definisi *strafbaar feit* yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 97

⁶ Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 75

⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, hal.182.

dihukum. Pompe mengatakan *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).⁸

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Dari uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh

⁸Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.225.*

⁹Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.59.*

penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionnya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: Kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: ¹⁰

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum dai suatu tindakan;
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Sedangkan ahli hukum Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ¹¹

Diancam dengan pidana oleh hukum;

- a) Bertentangan dengan hukum;
- b) Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- c) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a) Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);

¹⁰ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika*, Jakarta, hlm.211

¹¹ Amir Ilyas, S.H.,M.H., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, hlm.46

- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e) Kelakuan itu diancam dengan pidana.¹²

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang diruskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a) Barangsiapa;
- b) Mengambil;
- c) Suatu barang;

¹² C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.290

- d) Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e) Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

3. Pembagian Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang

didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹³

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachtteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;

¹³ P.A.F Laminantang, , 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193-194.

- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakan hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau tindak pidana.

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:

- a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtradingen*)

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b) Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materiil (*Materieel Delict*)

Delik formil (*Formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini masyarakat suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang perbuatannya.

Delik materiil (*materieel delict*) dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gawone Delicten*)

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Delik aduan absolute (*absolute klachtdelict*) adalah delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk penuntutan.
- 2) Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan

keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang harus dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus.

Delik umum (*gewonedelicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan.

e) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gamene delicten* atau *algamene delicten*

Delik khusus (*delicten propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f) Delik *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis Per Ommisionem Commissa*

Delik *Commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*.

Delik *Ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*.

Delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat.

Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut konferensi hukum pidana di Koppenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga

hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ.¹⁴ Dalam KUHP delik-delik yang dikualifikasi sebagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Di samping itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme.

Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :

- 1) Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan kepentingan politik.
- 2) Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan lain bahwa delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya

i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya.

Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

5. Bentuk-Bentuk Penyertaan

a) Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Salah satu subjek hukum pidana adalah manusia dengan kualifikasi tertentu, yaitu ia mempunyai kewajiban atau tanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini, suatu tindak pidana seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau tersebut *deelneming* atau keikutsertaan. Akan tetapi apabila seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana disebut *alleen dader*.

¹⁴ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 102.

Deelneming merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terutama berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Kedudukan masing-masing orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, sehingga berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Dalam perkara *deelneming* mungkin hanya satu orang atau lebih yang wajib dibebani bertanggung jawab pidana secara penuh, sedangkan lain orang hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.

b) Orang yang melakukan (*Dader*)

Dader dalam bahasa Belanda berarti pembuat. Kata *dader* berasal dari *daad* yang berarti membuat. Sedangkan dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*. Menurut Leden Marpung yang dimaksud dengan pelaku adalah yang memenuhi semua unsur delik yang diatur dalam undang-undang. Pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:¹⁵

- 1) Delik formil, pelakunya adalah orang yang memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- 2) Delik materiil, pelaku yaitu orang yang membutuhkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *AsasTeori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 78.

3) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

c) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenplegeri*)

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu delik namun tidak melakukan suatu delik namun tidak melakukan sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*. Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956.¹⁶

d) Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Orang yang turut melakukan atau orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi dua unsur berikut:

- 1) Harus ada kerjasama,
- 2) Harus ada kesadaran kerjasama.

¹⁶Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu delik atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr / 1970 berpendapat bahwa:

Perbuatan Terdakwa mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur 339 KUHP. Terdakwa ke-I yang memukul korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si korban. Oleh karena itu untuk Terdakwa ke-II, kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (*medeplagen*), sedangkan pembuat riilnya adalah Terdakwa.

e) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) sub dua KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya. Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah *mededader* orang

yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *mededader* dengan *uitlokker* adalah pada *mededader* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.¹⁷

Menurut Leden Mapung unsur-unsur yang ada didalam *utlokker* yaitu:¹⁸

- 1) Kesengajaan pembujuk ditunjukkan kepada dilakukannya delik atau tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk.
 - 2) Membujuk dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) sub dua KUHP yaitu dengan pemberian, perjanjian salah memakai kekuasaan, menyualah gunakan kesalahan, kekerasan, ancaman, tipu daya, dan kesempatan, ikhtiar atau keteranan.
 - 3) Orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tertentu.
 - 4) Orang yang terbujuk benar-benar melakukan tindak pidana, atau setidak-tidaknya percobaan atau *poging*
- f) Membantu (*Medeplichtgheid*)

¹⁷ Leden Marpaung, 2005, *Op.cit.* Hlm.24

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 85

Membantu atau *medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum

1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kemudian dalam Pasal 57 KUHP, mengatur bahwa untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana. Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini melakukan dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.¹⁹

B. Narkotika

1. Definisi Narkotika

¹⁹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, Hlm. 76.

Narkotika berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh terutama pada tubuh si pemakai, yaitu²⁰ :

- a. Mempengaruhi kesadaran ;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang ;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;

²⁰ Soedjono D. “*Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*”, penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976, Halaman 14.

3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto bahwa :

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.²¹

Sedangkan, Smith Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (Morphine, codein, methadone).²²

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin menjelaskan.²³

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cacin. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.

Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambahkan, yang dikenal sebagai Undang-undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja

²¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara,” penerbit Bina Aksara, hal. 480.

²² *Ibid*, halaman 481

²³ *Ibid*, halaman 482

pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-meneruskan dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”.

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O staatblad 1927 No. 278 jo. No. 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, *cocaine* kasar, *codeine* hanya dapat diperoleh dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu:²⁴

- a. Apoteker dan ahli kedokteran;
- b. Dokter hewan
- c. Pengusaha pabrik obat.

Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu

²⁴ Soedjono D., Op.Cit. Hal. 150

karena mengkonsumsi narkoba akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Zat-zat narkoba yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Jenis-jenis narkoba didalam Undang-undang Narkoba pada babIII Ruang Lingkup Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa narkoba digolongkan menjadi:

- a. Narkoba golongan I
- b. Narkoba golongan II, dan;
- c. Narkoba III.

Narkoba yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi,

kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

2. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak negatif, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

a. Opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut "*ikkanshu*", di Cina disebut "*Japien*". Banyak ditemukan di negara-negara, seperti Turki, Irak, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotic* dan *tranqlizer*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimoatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan *papaver somniferum* ini di antara lain adalah :

- 1) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);

- 2) Warna daun hijau tua (keperak-perakan);
- 3) Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm;
- 4) Permukaan daun tidak rata melainkan melekung-lekung;
- 5) Buahnya berbentuk seperti tabuh gong
- 6) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

Ada dua macam masakan candu, yaitu:

- 1) Candu masakan dingin (cingko);
- 2) Candu masakan hangat (jicingko).

Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morfin tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman.

Candu dan opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putau). Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di farmakologi) morphine dan heroin hasilnya berupa pethidine dan methadone digunakan sebagai obat.

b. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut:

1. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
2. Menolak penyakit mejan (diare).
3. Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
4. Dipakai sebelum diadakan pembedahan.

5. Dipakai didalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
6. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).²⁵

Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisi bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium/candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan

²⁵Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, Menanggulangi Bahaya Narkotika, penerbit Amanah R.I/B.P.Alda, hal.33

kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah :

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu dan belukar;
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter;
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;
- 5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh.

Ganja terbagi atas dua jenis, yaitu :

- 1) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat. Yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.

- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal sebagai beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu:

- 1) Minyak ganja;
- 2) Damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan;
- 3) *Budha stick atau thai stick*.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikotropika, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika sinthesis ini dibagi menjadi 3 bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

1. Depressants

Depressants atau depresi, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk

tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sebagai berikut.

- a) Sedativ/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- b) Tranquilizers (obat penenang)
- c) Mandrax
- d) Ativan
- e) Valium 5
- f) Metanium
- g) Rohypol
- h) Nitrazepam
- i) Megadon, dan lain lain.

Pemakaian obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

2. Stimulants

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong *stimulants* antara lain sebagai berikut:

- a) Amphetamine/ecstasy

- b) Meth-Amphetamine/shabu-shabu
- c) Kafein
- d) Kokain
- e) Khat
- f) Nikotin

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3. *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata kemudian meningkatkan pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- a) L.S.D (Lysergic Acid Diethylamide)
- b) P.C.D (Phencylidine)
- c) D.M.T (Demethyltryptamine)

- d) D.O.M (Illicit Form of STP)
- e) Psilacybe Mushrooms
- f) Peyote Cavtus, Buttons dab Ground Buttons

4. Obat adiktif lain

Yaitu yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalagi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan mukah merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya napza di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika/napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok.

1. Golongan Narkotika (Golongan I); seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain
2. Golongan Psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, shabu-shabu,hashis, dan lain-lain.

3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.²⁶

3. Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims*

²⁶Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky, "Tindak Pidana Narkotika", penerbit Ghalia Indonesia, halaman 24

adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana pada paparan di atas, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat diimplementasikan, maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkoba sebagai berikut.

1. Narkoba apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas memanfaatkan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkoba. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang Narkoba.
2. Penyalahgunaan narkoba meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:
 - a. Membuktikan keberadaan dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain;

- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
- g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.²⁷

Kecuali itu, tetapi dapat juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi.

- 3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan.
 - a. Pelaku utama
 - b. Pelaku peserta
 - c. Pelaku pembantu

²⁷Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976. Halaman 8-9

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong kedalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini.

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diuraikan di atas

b. Pengedaran narkoba;

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional

c. Jual beli narkoba;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dan ketiga bentuk Tindak Pidana Narkoba itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan teruma bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- 1) Pembunuhan;
- 2) Pencurian;
- 3) Penjambretan;

- 4) Pemerasan;
- 5) Pemerkosaan;
- 6) Penipuan;
- 7) Pelanggaran rambu lalu lintas;
- 8) Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

Sanksi hukuman berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).

C. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah

rasa tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.²⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.²⁹

Satochid Kartanegara, mengemukakan:³⁰

Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Selanjutnya Prof. Moelyatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:³¹

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa

²⁸ Amir Ilyas. *Loc.cit* hlm. 1

²⁹ *Ibid.*, hal. 2.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” dan pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³²

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:³³

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- b) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
- c) Teori Gabungan (*vernegins theorien*).

³² *Ibid.*, hal. 95

³³ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm 153

2. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan.

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum pidana dalam alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad yang ke-18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.³⁴

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.³⁵

Menurut Stahl mengemukakan bahwa:³⁶

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa:³⁷

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jila seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu

³⁴ Amir Ilyas, *loc. cit.* Hal. 98

³⁵ Ahmad Nindra Ferry, 2002, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar. Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm.23.

³⁶ Adami Chazawi, *op. cit.* hlm 155

³⁷ *Ibid.* Hlm. 156.

pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*sythese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa :³⁸

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

b) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*)

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh

³⁸ *Ibid.*

pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁹

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Laminantang sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Teori-teori mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- 2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat.⁴¹

c) Teori Gabungan (*vernegins theerin*).

³⁹ Amir Ilyas. *Loc.cit.* hlm 99

⁴⁰ Ahmad Nindra Ferry. *Op.,cit.* hlm.25

⁴¹ Adami Chazawi. *Op.,cit.* hlm. 158

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan:⁴²

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:⁴³

“Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

3. Jenis-jenis Pidana Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari

⁴²Andi Hamzah, Op.cit., hlm 36

⁴³*Ibid.*

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁴

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas :

- a) Pidana mati,
- b) Pidana penjara,
- c) Pidana kurungan, dan
- d) Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a) Pencabutan dari hak-hak tertentu,
- b) Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
- c) Pengumuman dari putusan hakim.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana#Sejarah diakses pada tanggal 18 September 2016 pukul 20.09

⁴⁵ Amir Ilyas. *Loc., cit.* hlm. 107

- a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada Pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c) Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

4. Pidana Mati

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi. Sementara praktik hukum mati masih diberlakukan di Indonesia, di Belanda telah menghapus praktik hukuman mati sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP mereka. Namun untuk kejahatan militer, hukuman mati masih tetap dipertahankan Belanda.⁴⁶

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Dalam situasi akhir-akhir ini, hukuman mati yang akan dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan warga negara Asing sebagai pelaku kejahatan ialah terkait dengan kejahatan narkoba. Namun harus dipahami bahwa kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* seperti narkoba tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Bahkan

⁴⁶Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab UU Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media Tama, 2003), hal. 459.

Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di New York Desra Percaya dan menyatakan “Indonesia menghargai upaya Sekjen PBB untuk melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah dari sipelaku kejahatan, namun menyayangkan sikapnya yang didasarkan pada pemahaman sempit dan sepihak,”.⁴⁷

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah :

- a) Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
- b) Sebagai Perwujudan pembalasan.
- c) Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
- d) Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.
- e) Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.⁴⁸

⁴⁷OK.Mohd.Fajar Ikhsan,”*Hukuman Mati : Antara Kedaulatan Hukum Dan Hubungan Antar Negara*”, <http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/>. di akses pada pukul18:00 WITA, tanggal 30-08-2016.

⁴⁸Tina Asmarawati,*Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2013, hlm. 82

Hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.⁴⁹

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu:⁵⁰

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (Kepala Presiden) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.⁵¹

Sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

⁴⁹ Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 33

⁵⁰ R. Soesilo, 1956, *Kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P.) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal untuk para pejabat Kepolisian, kedjaksaan, pamong-pradja dsb.* Bogor, 1956. Politeia.

⁵¹ Amir Ilyas. *Loc., cit.* hlm 110

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵²

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 (1) tersbut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

⁵²Undang-Undang Narkotika (UU. 35 Tahun 2009)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak pidana Pengedaran Narkotika dan Efektivitas Pidana Mati pada Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap nara sumber.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan

konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Umum Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus: No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

1. Narkotika

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai Narkotika. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika. Dan dengan pemberian sanksi pidana mati bagi para pelakunya.

Narkotika berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh terutama pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a) Mempengaruhi kesadaran ;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang ;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁵³

⁵³ Soedjono D. “*Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*”, penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976, Halaman 14.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/ pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

2. Pidana Mati

Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling controversial dari semua system pidana, baik di negara menganut *Common Law* maupun negara-negara yang menganut *Civil Law*.⁵⁴

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi. Sementara praktik hukum mati masih diberlakukan di Indonesia, di Belanda telah menghapus praktik hukuman mati sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP mereka. Namun untuk kejahatan militer, hukuman mati masih tetap dipertahankan Belanda.⁵⁵

⁵⁴ Achmad Ali, 2010, *Menguak Realita Hukum*, Media Grafika, Jakarta, hal.34

⁵⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab UU Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media Tama, 2003), hal. 459.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Dalam situasi akhir-akhir ini, hukuman mati yang akan dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan warga negara Asing sebagai pelaku kejahatan ialah terkait dengan kejahatan narkoba. Namun harus dipahami bahwa kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* seperti narkoba tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Bahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di New York Desra Percaya dan menyatakan “Indonesia menghargai upaya Sekjen PBB untuk melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah dari sipelaku kejahatan, namun menyayangkan sikapnya yang didasarkan pada pemahaman sempit dan sepihak.”⁵⁶

⁵⁶OK.Mohd.Fajar Ikhsan, “*Hukuman Mati : Antara Kedaulatan Hukum Dan Hubungan Antar Negara*”, <http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/>. di akses pada pukul18:00 WITA, tanggal 30-08-2016.

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah :⁵⁷

- a) Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
- b) Sebagai Perwujudan pembalasan.
- c) Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
- d) Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.
- e) Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.

Hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.⁵⁸

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu:⁵⁹

⁵⁷ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2013, hlm. 82

⁵⁸ Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 33

⁵⁹ R. Soesilo, 1956, *Kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P.) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal untuk para pendjabat Kepolisian, kedjaksaan, pamong-pradja dsb.* Bogor, 1956. Politeia.

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkanfiat eksekusi dari Presiden (Kepala Presiden) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.⁶⁰

Sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

⁶⁰ Amir Ilyas. *Loc.,cit.* hlm 110

atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶¹

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

⁶¹Undang-Undang Narkotika (UU. 35 Tahun 2009)

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

B. Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

1. Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

- a) Pidana pokok:
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda
- b) Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) Perampasan barang yang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan Hakim

Dengan demikian, maka pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan merupakan pidana pokok yang masih diakui eksistensinya.

Bentuk pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial yang banyak mengundang Pro dan Kontra di kalangan ahli hukum dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan "*Wet boek van Strafrecht*" yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala

Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

Patut diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan Presiden(*fiat executie*).

Maka jelaslah disini bahwa pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana pemidanaan yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasakan membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara sekalipun.

2. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 KUHP:

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Seiring dengan peradaban manusia, cara menggantung terpidana dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam S. 1945 : 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan

bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati”. untuk ketentuan pelaksanaannya secara rinci di jelaskan pada UU No. 2 (PNPS) tahun 1964.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan.

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut:

- a) Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
- b) Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
- c) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat 1 yang bersangkutan;

- d) Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
- e) Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
- f) Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
- g) Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
- h) Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga;
- i) Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.

3. Pro dan Kontra Pidana Mati

Dari segi pro pidana mati pada umumnya dikemukakan alasan sebagai berikut:⁶²

- a) Pidana mati menjamin bahwa si Penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini.
- b) Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama dalam memerintah daerah Hindia Belanda.

⁶²J.E. Sahetapy, 1979,*Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*.Alumni; Bandung hal: 71

- c) Dengan alat represi yang kuat ini, kepentingan masyarakat dapat dijamin, dengan demikian, ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
- d) Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.
- e) Terutama dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbul rasa takut untuk berbuat kejahatan.
- f) Enthoven mengutip pendapat dari Lambroso, bahwa dengan dijatuhkannya serta dilaksanakannya pidana mati, maka akan ada seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri dari warga yang baik-baik saja.
- g) Gorofalo ikut menguatkan pendapat Lambroso, dikemukakan bahwa dengan dilaksakannya pidana mati terhadap lebih-kurang 70.000 orang dengan berdasarkan undang-undang di bawah pemerintahan Eduard VI dan Elisabeth, maka terbukti bahwa kejahatan berkurang banyak sekali.

Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat.

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Hal ini dapat penulis gambarkan, melalui pendapatnya yang menyatakan:⁶³

“bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”

Sedangkan alasan kontra pidana mati muncul dari para sarjana hukum Belanda yang menggolongkan diri dalam barisan abolisi, dengan alasan sebagai berikut:⁶⁴

- a) Pada umumnya para Sarjana Hukum Belanda yang menentang Pidana mati (selanjutnya disebut abolisionis) tidak dapat mengerti berdasarkan asas konkordansi pidana mati tetap dipertahankan di Hindia Belanda.
- b) Para Abolisionis berpendapat bahwa pidana mati bukanlah pidana karena pidana mati tidak memenuhi kriteria yang diisyaratkan bagi pidana. Dalam pidatonya, menteri Modderman berpendapat bahwa :

⁶³<http://dickyputraarumawan.blogspot.co.id/2015/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html> diakses pada tanggal 23 November 2016 Pukul 00.00

⁶⁴*Ibid*, hal. 72

- 1) Pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat
 - 2) Dengan dijatuhi pidana mati maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah tertutup sama sekali.
 - 3) Kepastian bahwa keputusan hakim telah tepat, benar, dan adil sulit untuk dijamin sebab sebagaimana pun hakim tetap seorang manusia.
 - 4) Dengan dilaksanakannya pidana mati, maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi.
 - 5) Putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat.
- c) Nyawa seorang manusia sekalipun ia seorang penjahat besar, tidak boleh dicabut begitu saja dengan eksekusi pidana mati; juga menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pribumi yang dikualifikasi sebagai “penduduk kurang berbudaya dan kurang berpendidikan”.
- d) Kalau pidana mati dianggap sebagai suatu alat untuk menakutkan calon-calon penjahat maka sulitlah untuk menakutkan calon-calon penjahat, maka sulitlah untuk menerima pemikiran tentang dasar adanya lembaga grasi yang kontroversial itu.

- e) Sulit untuk dipahami, kalau pidana mati berfungsi untuk menakutkan, dimana pelaksanaannya dilaksanakan di tempat tertutup, dan tidak dapat dilihat oleh umum.
- f) Pidana mati bukan suatu alat yang ampuh yang dapat menakutkan para calon penjahat. Dengan dihapuskannya pidana mati di Belanda misalnya, kejahatan ternyata tidak bertambah.
- g) Dikemukakan oleh para Abolisionis bahwa ajaran Kant dan Hegel tentang pembalasan yang murni kini sulit dipertahankan. Teori absolute secara praktis tidak mempunyai penganut lagi, serta tidak mempunyai dasar pemikiran yang kokoh dewasa ini.

Selanjutnya, inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.

Untuk memperkuat argumen di atas, maka alangkah baiknya penulis memperkuatnya dengan menyajikan bunyi dari Konklusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut, yang menyatakan :

Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf (a), Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) huruf (a); Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat 2 (huruf) a dan Ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

4. Pidana Mati dalam Perspektif HAM

Jika kita berpegang pada prinsip dan norma hak-hak asasi manusia, hukuman mati memang harus ditolak atau dihapuskan, karena ia bertentangan dengan prinsip atau norma tersebut. Terlepas dari beratnya tindak pidana yang didakwakan atas seseorang. Hak untuk hidup ini sangat ditekankan untuk dihormati dan dilindungi, seperti yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 serta pasal 4 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁵

⁶⁵http://www.kompasiana.com/suciana0496/hukuman-mati-dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia_55547fc66523bda6144af03e

Terhadap masalah tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dilihat sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila lainnya. Namun, jika Pancasila dilihat secara Parsial (menitik beratkan pada salah satu sila), ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila, adapula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, pendapat yang menolak dan menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila.
- b) “Hak untuk hidup” (Pasal 28A jo Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1)jo Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa” (Pasal 33 Undang-Undang Hak Asasi Manusia) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan “pidana mati”. Hal ini sama dengan “hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia) atau hak atas kemerdekaan (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara”. Apabila dihadapkan secara diametral, berarti pidana “penjara” pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia karena

pidana penjara pada hakikatnya adalah “perampasan kemerdekaan/kebebasan”.

Sebagaimana yang telah kita pelajari semua ketika mempelajari “Teori Hukum”, khususnya tentang berbagai metode penemuan hukum oleh hakim, maka kita ketahui bahwa salah satu jenis interpretasi adalah interpretasi sistematis yang pada pokoknya adalah suatu Pasal atau subPasal dalam perundang-undangan, tidak bisa hanya dipahami secara parsial, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan pasal lain atau subPasal lain atau bahkan dengan perundang-undangan lain. Hukum senantiasa harus dilihat sebagai “satu sistem utuh”, dan tidak parsial.⁶⁶

Dengan demikian pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, harus dihubungkan dengan pasal 28 J yang merupakan pengecualian dan *lex specialis* yang menentukan:

- a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk

⁶⁶ Achmad Ali, *Op.cit.*, hal. 43

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J inilah yang menjadi dasar utama pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati itu memenuhi criteria yang ada dalam pasal 28 J.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku kepemilikan Narkoba Gol. I dalam putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus: No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks), maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 di depan Hotel Singgasana Makassar sekitar pukul 02.00, ketika diadakan Operasi Cipta Kondisi oleh Polsek Ujung Pandang, kemudian melintas sebuah taksi, setelah diperiksa ditemukan 3 bungkus shabu-shabu dikantong celana Michael Wibisono, dan setelah diinterogasi mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian kepada Michael diminta untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon, bahwa Terdakwa sedang berada di Studio 33 Hotel Clarion Makassar.

Kemudian setibanya di Studio 33 mendapati terdakwa pada room 316 bersama seorang laki-laki dan 2 orang wanita sedang menikmati music, kemudian dilakukan penggeledahan, namun tidak didapati barang bukti, namun setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa bahwa shabu miliknya ada di rumah kostnya yang bertempat di Jalan Andi Tonro, Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No. 17 Makassar. Setelah tiba, terdakwa sendiri yang menunjukkan sebuah tas di atas lemari, yang berisi 1 paket besar shabu-shabu, kemudian diinterogasi dan mengakui sebagian disimpan di sebuah rumah di Jalan Lamadukelleng Buntu Makassar.

Kemudian Kepolisian dan Terdakwa menuju lokasi tersebut, yang di dalamnya ada 1 keluarga di dalam rumah. Kemudian terdakwa menunjuk lantai 2 kamar temannya. Kemudian tersangka mengambil sebuah koper yang di dalamnya berisi 13 bungkus besar shabu-shabu dan 3 bungkus besar berisi pil extasy, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pengedaran Narkotika yang dibacakan pada di depan Majelis Hakim:

a) Bahwa ia terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar 03.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Clarion Studio 33 Jln. A. P. Pettarani Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

1) Bahwa berawal pada saat Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI berada di pulau Kalimantan kemudian menerima penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ecstasy dari Lk. IWAN (DPO), selanjutnya shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut terdakwa bawa ke Makassar setelah berada di Makassar kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Pondok Rajawali Kamar No. 205 Jl. Rajawali Makassar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. MICHAEL WIBISONO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah menerima penyerahan shabu-shabu tersebut kemudian Lk. MICHAEL WIBISONO pulang hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita Lk. MICHAEL WIBISONO berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan sedang membawa atau memiliki 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian menyuruh Lk. MICHAEL WIBISONO untuk menelpon Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan sedang berada di Hotel Clarion Studio 33 Jl. A. P. Pettarani Makassar, sehingga petugas Kepolisian membawa Lk. MICHAEL WIBISONO untuk menemui Terdakwa ditempat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa shabu-shabu miliknya Terdakwa simpan di rumah kostnya di Jl. Andi Tonro Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No. 17 Makassar, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah kostnya tersebut dan didalam rumah kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam lemari

pakaiannya, kemudian terdakwa mengakui lagi kalau barang berupa shabu-shabu miliknya sebagian lagi terdakwa simpan di rumah keluarganya di Jl. Lamadukelleng Buntu Makassar sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa ketempat tersebut dan setelah tiba kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 8 (delapan) bungkus/sachet berisi Pil Ekstasi ssebanyak 4208 butir yang terdakwa simpan dalam koper warna hitam kemudian ditemukan pula peralatan berupa 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/skill, selanjutnya terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 136/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto masing-masing:

Sachet I seberat 81,2806 gram, sachet II seberat 95,3402 gram, sachet III seberat 94,3154 gram, sachet IV seberat 95,4075 gram, sachet V seberat 84,6185 gram, sachet VI seberat 74,7314 gram, sachet VII seberat 80,1207 gram, sachet VIII seberat 93,4134 gram, sachet IX seberat 94,2996 gram, sachet X seberat 46,8536 gram, sachet XI seberat 54,7326 gram, sachet XII seberat 24,5206 gram, dan sachet XIII seberat 2, 1064 gram, jumlah berat netto keseluruhannya 921,7265 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0452 gram milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan logo "Channel" masing-masing berjumlah : Bungkus I sebanyak 2005 butir, bungkus II sebanyak 1503 butir, bungkus III sebanyak 252 butir, bungkus IV sebanyak 160 butir, bungkus V sebanyak 99 butir, bungkus VI sebanyak 99 butir, bungkus VII sebanyak 45 butir, bungkus VIII sebanyak 45 butir, jumlah keseluruhan sebanyak 4208 butir milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias

ACO Alias YUDI adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar 03.30 waita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Clarion Studio 33 Jln. A. P. Pettarani Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- 1) Bahwa berawal pada saat petugas kepolisian menangkap Lk. MICHAEL WIBISONO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) karena telah ditemukan membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah diinterogasi mengakui kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian menyuruh Lk. MICHAEL WIBISONO untuk menelpon Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan sedang berada di Hotel Clarion Studio 33 Jl. A. P. Pettarani Makassar, sehingga petugas Kepolisian membawa Lk. MICHAEL WIBISONO untuk menemui Terdakwa ditempat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa shabu-shabu miliknya Terdakwa simpan dirumah kostnya di Jl. Andi Tonro Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No. 17 Makassar, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah kostnya tersebut dan didalam rumah kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam lemari pakaiannya, kemudian terdakwa mengakui lagi kalau barang berupa shabu-shabu miliknya sebagian lagi terdakwa simpan dirumah keluarganya di Jl. Lamadukelleng Buntu Makassar

sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa ketempat tersebut dan setelah tiba kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 8 (delapan) bungkus/sachet berisi Pil Ekstasi sebanyak 4208 butir yang terdakwa simpan dalam koper warna hitam kemudian ditemukan pula peralatan berupa 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/skill, selanjutnya terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 136/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto masing-masing:

Sachet I seberat 81,2806 gram, sachet II seberat 95,3402 gram, sachet III seberat 94,3154 gram, sachet IV seberat 95,4075 gram, sachet V seberat 84,6185 gram, sachet VI seberat 74,7314 gram, sachet VII seberat 80,1207 gram, sachet VIII seberat 93,4134 gram, sachet IX seberat 94,2996 gram, sachet X seberat 46,8536 gram, sachet XI seberat 54,7326 gram, sachet XII seberat 24,5206 gram, dan sachet XIII seberat 2, 1064 gram, jumlah berat netto keseluruhannya 921,7265 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0452 gram milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan logo "Channel" masing-masing berjumlah : Bungkus I sebanyak 2005 butir, bungkus II sebanyak 1503 butir, bungkus III sebanyak 252 butir, bungkus IV sebanyak 160 butir, bungkus V sebanyak 99 butir, bungkus VI sebanyak 99 butir, bungkus VII sebanyak 45 butir, bungkus VIII sebanyak 45 butir, jumlah keseluruhan sebanyak 4208 butir milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung MDMA: (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Pengedaran Narkotika Golongan. I, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan pertama ;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI, oleh karena itu dengan PIDANA MATI ;
- c) Menyatakan batang bukti berupa : 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat neto keseluruhan 921,7265 gram, 8 (delapan) bungkus plastik berisi 4.208 butir pil ekstasi warna kuning dengan logo “Channel”, 2 (dua) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk kris Chef, 1 (satu) buah koper warna hitam merk Insight dan 1 (satu) buah tas coklat, dirampas untuk dimusnkan ;
- d) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ibrahim Palino, SH.MH. sebagai Hakim

Ketua Majelis, Suparman Nyompa S.H., M.H. dan Kristian P. Djati S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H. Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Nur Fitrianty, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa, serta Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
- c) Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 921, 7265 gram ;
 - 2) 8 (delapan) bungkus plastik berisi 4.208 butir pil ekstasi warna kuning dengan logo “Channel”;
 - 3) 2 (dua) buah pipet kaca/pireks ;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk kris Chef ;
 - 5) 1 (satu) buah koper warna hitam merk Insight ;

6) 1 (satu) buah tas coklat.

Semuanya dimusnahkan;

d) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian

hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa berawal pada saat Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI berada di pulau Kalimantan tepatnya di kota Bontang, menerima peyerahan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasy dari IWA (DPO), selanjutnya shabu-shabu dan Pil Ekstasy tersebut Terdakwa bawa ke Makassar mempergunakan kapal yang disewa Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b) Bahwa setelah berada di Makassar, Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Pondok Rajawali Kamar No. 205 Jl. Rajawali Makassar Terdakwa menyerahkan sebagian dari shabu-shabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Shabu-Shabu yang menurut Terdakwa beratnya 50 (lima puluh) gram kepada Michael Wibisono
- c) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 di depan Hotel Singgasana Makassar sekitar pukul 00.30, ketika diadakan Operasi Cipta Kondisi, Michael Wibisono lewat menumpang sebuah taksi kemudian taksi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan di atas mobil taksi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibawa oleh Michael Wibisono dan setelah dilakukan interogasi terhadap Michael Wibisono mengakui kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa ;
- d) Bahwa setelah mendapat informasi kalau Michael Wibisono memperoleh shabu-shabu yang ditemukan petugas itu dari Terdakwa, maka petugas Kepolisian menyuruh Michael Wibisono untuk menelpon Terdakwa dan oleh Terdakwa menjawab kalau ia sedang berada di hotel Clarion Studio 33 Jl. A. P. Pettarani Makassar, kemudian petugas Kepolisian membawa Michael Wibisono untuk menemui Terdakwa ditempat tersebut;
- e) Bahwa setelah sampai di hotel Clarion Studio 33 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap

diri Terdakwa dan penangkapan terhadap Terdakwa pada malam itu, namun tidak ditemukan narkotika, namun setelah diinterogasi secara intensif, akhirnya Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu yang Terdakwa simpan di rumah kostnya di Jl. Andi Tonro Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No. 17 Makassar ;

- f) Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah kostnya tersebut dan didalam rumah kost Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam lemari pakaiannya, kemudian Terdakwa mengakui lagi kalau barang berupa shabu-shabu miliknya sebagian lagi Terdakwa simpan di rumah keluarganya di Jl. Lamadukelleng Buntu Makassar ;
- g) Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat yang ditunjuk Terdakwa yaitu di sebuah rumah Jl. Lamadukelleng Buntu dan setelah tiba di rumah tersebut petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 8 (delapan) bungkus/sachet berisi Pil Ekstasi sebanyak 4208 butir yang Terdakwa simpan dalam koper warna hitam kemudian ditemukan pula peralatan berupa 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/skill, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- h) Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 136/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto masing-masing: Sachet I seberat 81,2806 gram, sachet II seberat 95,3402 gram, sachet III seberat 94,3154 gram, sachet IV seberat 95,4075 gram, sachet V seberat 84,6185 gram, sachet VI seberat 74,7314 gram, sachet VII seberat 80,1207 gram, sachet VIII seberat 93,4134 gram, sachet IX seberat 94,2996 gram, sachet X seberat 46,8536 gram, sachet XI seberat 54,7326 gram, sachet XII seberat 24,5206 gram, dan sachet XIII seberat 2, 1064 gram, jumlah berat netto keseluruhannya 921,7265 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0452 gram milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan logo "Channel" masing-masing berjumlah : Bungkus I sebanyak 2005 butir, bungkus II sebanyak 1503 butir, bungkus III sebanyak 252 butir, bungkus IV sebanyak 160 butir, bungkus V sebanyak 99 butir, bungkus VI sebanyak 99 butir, bungkus VII sebanyak 45 butir, bungkus VIII sebanyak 45 butir, jumlah keseluruhan sebanyak 4208 butir milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung MDMA: (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- i) Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap di Makassar, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindakan peredaran gelap narkotika dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan masing-masing ;
- 1) Putusan No 134/PID/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 21 Oktober 2010, dengan pidana penjara selama 6 tahun
 - 2) Putusan No. 123/Pid.Sus/2011/PN.Bpp, tanggal 11 Oktober 2011 dengan pidana penjara selama 6 tahun ;
 - 3) Putusan No. 112/Pid/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 20 November 2013 dengan pidana penjara selama 20 tahun, Bahkan menurut keterangan dari Kepala Rutan Balikpapan bahwa Terdakwa dihukum terakhir dengan pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks adalah:

- a) Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan, maka pembelaan penasehat hukum Terdakwa, yang belum secara spesifik dipertimbangkan dalam uraian di atas, sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;
- b) Sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa.
- c) Penuntut umum dalam surat dakwaannya menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana mati, sedangkan Terdakwa dan penasihat hukumnya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman mati, dan jika majelis berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya.
- d) Terkait mengenai pidana mati yang merupakan salah satu jenis pidana yang eksistensinya masih berlaku dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana sudah jelas diatur tentang jenis pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.
- e) Dalam pandangan majelis hakim bahwa penjatuhan hukuman mati tidak semata-mata karena pelaku atau Terdakwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana mati, akan tetapi lebih dari itu agar orang lain tidak melakukan kejahatan atau mencegah

orang lain untuk tidak berbuat serupa. Bahwa peredaran narkoba dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang-ulang adalah sangat membahayakan kehidupan manusia yang beradab sehingga tidak sekedar dipandang sebagai masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan sudah sangat erat kaitannya dengan masalah kemanusiaan/social dan rasa keadilan masyarakat yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia

f) Juga berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sudah tiga kali dijatuhi pidana penjara dalam kasus peredaran narkoba berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yakni dalam:

- 1) Putusan No 134/PID/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 21 Oktober 2010, dengan pidana penjara selama 6 tahun
- 2) Putusan No. 123/Pid.Sus/2011/PN.Bpp, tanggal 11 Oktober 2011 dengan pidana penjara selama 6 tahun ;
- 3) Putusan No. 112/Pid/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 20 November 2013 dengan pidana penjara selama 20 tahun

Sehingga total hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 32(tiga puluh dua)tahun, dimana letak kejahatan yang dilakukan Terdakwa bahkan dilakukan dari balik jeruji besi, maka sesungguhnya penjatuhan pidana sama sekali tidak membuat efek jera, bahkan ketika Terdakwa sudah melarikan diri dari penjara, Terdakwa tetap melakukan kejahatan serupa

g) Dalam peredaran narkoba yang dilakukan di Balikpapan sudah tiga kali dijatuhi pidana penjara, sehingga sudah terbukti bahwa Terdakwa sudah termasuk residivis

h) Bahwa semua barang bukti yang disita oleh penyidik berupa:

- 1) 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 921, 7265 gram ;
- 2) 8 (delapan) bungkus plastik berisi 4.208 butir pil ekstasi warna kuning dengan logo "Channel";
- 3) 2 (dua) buah pipet kaca/pireks ;

- 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk kris Chef ;
- 5) 1 (satu) buah koper warna hitam merk Insight ;
- 6) 1 (satu) buah tas coklat.

Karena barang bukti tersebut adalah illegal dan telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan

- i) Sebelum menentukan hukuman yang pantas dan adil bagi Terdakwa akan diketengahkan beberapa hal yang memberatkan pemidanaandan meringankan pemidanaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa sudah 3(tiga) kali pernah dihukum (residivis) dalam kasus narkoba dan sudah dijatuhi pidana penjara dengan total pidana yang dijatuhkan yaitu 32 tahun.
 - 2) Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masyarakat pada umumnya ;
 - 3) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
 - 4) Narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini jumlahnya banyak, yakni shabu-shabu sebanyak 921,7265 gram dan pil ekstasi sebanyak 4.208 butir dan dalam perkara Terdakwa sebelumnya di Pengadilan Negeri Balikpapan jumlah barang buktinya sekitar 2 (dua) kg shabu-shabu

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Tidak ada:

Kutipan wawancara dengan Hakim Anggota Kristian P. Djati:

Meskipun menimbulkan pro dan kontra mengenai pidana mati, namun bagaimanapun juga hakim pada saat melaksanakan tugasnya harus mengacu pada tujuan hukum asas kepastian, asas keadilan dan kemanfaatan.

6. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik dalam proses persidangan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang Tindak Pidana Pengedaran Narkotika oleh AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI yang dalam putusan hakim dijatuhi Hukuman Mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam pengedaran Narkotika Gol.I. dalam kasus ini surat dakwaan yang dikeluarkan Oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah memenuhi syarat formil yang sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 142 ayat 2 dan 3:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a) **Setiap Orang** ; bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

- b) **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;**

unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur atas perbuatan tersebut yaitu apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, maka terpenuhilah unsur tersebut. Terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam suratuntutannya berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti terpenuhi dengan alasan hukum pada pokoknya berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini bahwa terdakwa telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang.

- c) **Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Bahwa yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

berfokus pada beratnya narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* yakni jika narkoba itu adalah berupa tanaman maka beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon. Dan apabila dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya lima gram. Sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang berhasil disita petugas Kepolisian beratnya adalah 921,7265 gram dan pil ekstasi sebanyak 4.208 (empat ribu dua ratus delapan) butir, ditambah lagi dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Michael Wibisono yang menurut pengakuannya Terdakwa beratnya adalah 50 (lima puluh) gram, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah bentukan narkoba bukan tanaman.

Dari fakta dan bukti-bukti yang dibawa dalam persidangan maka dapat dibuktikan AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI Narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIA Balikpapan, yang dalam perkara ini tertangkap dalam daerah Kewenangan Kepolisian Sulawesi Selatan, dengan menyembunyikan Narkoba jenis shabu-shabu seberat 921,7265 gram ditambah dengan Narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan kepada terdakwa Michael Wibisono seberat 50gram, dengan total 971, 7265 gram. Dan pil ekstasi sebanyak 4208

butir milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Gol. I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Narkotika.

Terpenuhinya unsur dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana Mati terhadap terdakwa, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika, dimana hukuman maksimal nya adalah Pidana Mati dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan

pada fakta – fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan pasal – pasal dalam hukum pidana. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap Terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Tindak pidana peredaran Narkotika menurut penulis merupakan kejahatan yang luar biasa, karena melihat fakta efek setelah penggunaan Narkotika yang juga dapat menyebabkan lahirnya tindakan-tindakan kriminal. Perbuatan Terdakwa juga merusak generasi muda, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sedang berada dalam darurat narkoba. Hal tersebut dikatakan Kepala BNN. Menurut beliau, pada Juni 2015 tercatat ada sebanyak 4,2

juta pengguna narkoba dan meningkat pada Oktober 2015 menjadi 5,9 juta orang.⁶⁷

Serta Terdakwa diketahui merupakan residivis dimana residivis dirumuskan dalam aturan khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-delik tertentu⁶⁸. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁶⁷<http://kabar24.bisnis.com/read/20151111/16/490929/kepala-bnn-indonesia-darurat-narkoba>

⁶⁸Barda Nawawi Arief "Perbandingan Hukum Pidana", penerbit RajaGrafindo Persada, halaman 164

Dan menurut penulis apa yang majelis Hakim putuskan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa merupakan hal yang sangat tepat, karena berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti belum lagi pemberatan karena berstatus residivis terhadap kasus yang sama, juga karena Terdakwa yang merupakan buron dari Kepolisian Balikpapan karena kabur dari Penjara. Serta posisi kasus Terdakwa sebelumnya di Balikpapan yang dipidana penjara 20 tahun atas kepemilikan 2 kg Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian kabur dari lapas kelas IIA Balikpapan dengan cara membobol palfon Lapas, kemudian ditangkap kembali di Makassar yang menandakan tidak ada efek jera terhadap Terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika pada perkara Putusan Nomor : 469/PID.SUS/2015/PN.MKS telah sesuai dan memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
2. Penjatuhan pidana mati kepada para pelaku pengedar narkotika sudah di anggap sangat tepat tapi tidak mencapai tujuan prevensi umum yaitu agar orang-orang secara umum yang bertujuan untuk menakut-nakluti agar tidak melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika. Hal ini dikarenakan pada kenyatannya bahwa eksekusi pidana mati tidak dilakukan di muka umum berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan
Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, Pasal 9 yang berbunyi:

Pidana Mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara
sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Berdasarkan teori pencegahan khusus yang sudah tidak dapat
dipenuhi, karena terpidana sudah dieksekusi mati, maka dilihat dari
teori Pencegahan Umum dengan tujuan menakut-nakuti khalayak
umum, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi yang
melaksanakan Hukuman Mati (*Qisas*) di lakukan setiap jumat, setelah
salat jumat. Dilakukan di tempat umum agar semua warga melihat
dengan penjagaan ketat oleh aparat keamanan. Dan terbukti hukuman
mati dapat membuat tingkat kriminalitas di Arab Saudi menurun.
Karena salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa ini
adalah peredaran narkoba yang amat sangat menghawatirkan dan
Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran
narkoba, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-
undang No 35 tahun 2009 sudah di anggap sangat tepat dikarnakan
untuk memberikan efek jera di tujukan kepada seluruh masyarakat
agar meraka yang masih menjadi pelaku pengedar narkoba agar
segera berhenti karna sanksi yang di berikan kepada pelaku pengedar
narkoba ialah pidana mati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penjatuhan Pidana Mati yang merupakan Pidana Pokok dalam KUHP merupakan hal yang kontroversial, maka dalam penjatuhannya Majelis Hakim haruslah memperhatikan fakta-fakta persidangan, dan hal-hal diluar dari persidangan. Karena eksekusi pidana mati menyangkut nyawa dan hak hidup seseorang.
2. Eksekusi pidana mati banyak mengundang pro dan kontra. Tapi menurut penulis Hukuman Mati tetap harus diterapkan untuk ketentuan pidana yang sudah mengancam kepentingan umat manusia. Dalam hal ini pidana Narkotika, Indonesia yang saat ini benar-benar dalam keadaan Darurat Narkotika, agar dalam teori tujuan pemidanaan dapat tercapai.
3. Selain dalam penjatuhan pidana mati, Pemerintah juga lebih mengencarkan sosialisasi penyalahgunaan Narkotika dalam tahap Preventif kepada Generasi Muda. Selain generasi muda, generasi pekerja perlu dilakukan, karena faktor-faktor sehingga para pengguna biasanya timbul dari lingkungan sekitar, dan kurang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2010, Menguak Realita Hukum, Media Grafika, Jakarta, hal.34
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta :PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Nindra Ferry. 2002.Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar. Makassar :Perpustakaan Unhas.
- Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana (EdisiRevisi). Jakarta: RinekaCipta.
- Andi Hamzah.2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang
- Barda Nawawi Arief “Perbandingan Hukum Pidana”, penerbit Raja Grafindo Persada, halaman 164
- B.P. Alda.1985.Menanggunangi Bahaya Narkotika. Jakarta: Amanah R.I
- C.S.T.Kancil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso dkk. 1987. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara.Jakarta: Bina Aksara
- D. Soedjono 1976. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Bandung:PT. Karya Nusantara.
- J.E.Sahetapy,1979,Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Alumni; Bandung
- E.Y Kanter..1982.Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.Jakarta:Alumni AHM-PTHM.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.

Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika..

Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Philip Nonet & Philip Selznick. 2007. Hukum Responsif. Bandung: Nusamedia

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Remmelink Jan. 2003. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab UU Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Media Tama

R Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia.

Satochid Kartanegara. 1998. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Tina Asmarawati. 2013. Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish

Taufik Makara dkk. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia

Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1 Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika

Web:

Fajar Ikhsan OK. Mohd. Hukuman Mati : Antara Kedaulatan Hukum Dan Hubungan Antar Negara. <http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara->

kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/.
diakses pada pukul 18:00 WITA, tanggal 30-08-2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab Undang-undang Hukum Pidana#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana#Sejarah)
diakses pada tanggal 18 September 2016 pukul 20.09

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> diakses pada
tanggal 7 November pukul. 10.08

<http://kabar24.bisnis.com/read/20151111/16/490929/kepala-bnn-indonesia-darurat-narkoba>

<http://dickyputraarumawan.blogspot.co.id/2015/02/v-behavior:urldefaultvmlo.html> diakses pada tanggal 23 November 2016
Pukul 00.00

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009

Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6
Tahun 1976.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1
Desember 1956.